

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Memasuki era reformasi kita dihadapkan dengan perubahan arah pembangunan yang bertumpu pada peningkatan sumberdaya aparatur pemerintah sebagai kunci pokok tercapainya cita-cita bangsa yang merdeka dan berkembang. Upaya peningkatan sumberdaya aparatur yang berkualitas harus dimulai pada tingkat pemerintahan di pekon dengan asumsi bahwa tingginya kualitas aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung dari kualitas sumber daya manusia.

Kepemimpinan kepala pekon sangatlah dibutuhkan untuk dapat mensukseskan pelaksanaan pembangunan pekon. Kepala pekon mempunyai tugas penyelenggaraan pekon yaitu: a). Urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan pekon seperti, pembuatan peraturan pekon, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik daerah, dan kerja sama antar pekon, b). Urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum pekon seperti, jalan pekon, jembatan pekon, kantor pekon, masjid pekon, penampungan air bersih, pendirian gedung pendidikan, dan tempat layanan kesehatan. c). Urusan

kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat. (Trisantono, 2011 : 7).

Kepala pekon sebagai penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dituntut untuk mempunyai kemampuan dapat menggerakkan masyarakat pekon untuk secara bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan pekon. Untuk dapat memenuhi kehendak dan kebutuhan masyarakat pekon, sebagai aktualisasi kepemimpinannya, maka kepala pekon harus mempunyai kemampuan untuk diterapkan dalam upaya menggerakkan dan mengarahkan serta mempengaruhi masyarakat yang dipimpinnya. Terjadinya ketidakmerataan pembangunan pekon bisa berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas warga masyarakat tersebut, dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kelangsungan pekon. Sehingga bukan hanya tugas pemerintah pekon dalam pembangunan infrastruktur fisik, tetapi seperti apa solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyeleksi proyek-proyek pembangunan di suatu pekon. Pembangunan di pekon tidak boleh bercampur dengan unsur-unsur politik suatu kepala SKPD sehingga tidak berdampak pada pekon yang sudah maju makin sejahtera dan pekon yang belum maju makin melarat.

Sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang meliputi pendekatan *top-down* dan *bottom up*, nampaknya akan menjamin keseimbangan antara prioritas nasional dengan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan daerah,

termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur pada pekon. Namun pada kenyataannya banyak daerah yang belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal, ada sebagian besar proposal proyek pembangunan seperti perbaikan jalan untuk di aspal, perbaikan kantor pekon, pembuatan puskesmas baru, penampungan air bersih yang diajukan malah melewati berbagai kendala-kendala dari permainan birokrat yang ada di daerah. Jadi untuk dapat merumuskan sebuah konsep pembangunan pekon, maka harus mengubah paradigma bahwa pembangunan infrastruktur itu bukan hanya di daerah perkotaan saja tetapi di pekon juga.

Keberhasilan suatu wilayah itu dilihat dari bagaimana pembangunan di pekon, apakah sudah mensejahterakan masyarakatnya atau belum. Pembangunan infrastruktur di pekon tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan kota, pekon dan kota memiliki potensi yang berbeda sehingga dengan memadukan keduanya diperoleh keuntungan satu sama lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan pekon, tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dalam arti bahwa pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan. Pertumbuhan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan dalam menjalankan Pemerintah Pekon yakni di Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya penulis mengamati ketika mengadakan observasi, gejala yang nampak oleh penulis adalah ketika perjalanan menuju Pekon Sindang Pagar jalan aspal yang bagus kini sudah rusak/bolong-bolong, selain itu proses kegiatan pelayanan kepada masyarakat berlangsung staf yang berwenang untuk mengurus keperluan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut tidak ada di

tempat pelayanan / kantor pekon melainkan harus ke rumah kepala pekon pada saat jam kantor, akan tetapi kepala Pekon Sindang Pagar dengan sikap yang sangat bijaksana dan welcome terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan terhadap kepentingan pribadi ataupun bersama demi untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Sindang Pagar sehingga dengan sikap loyalitasnya masyarakat antusias terhadap kepemimpinan kepala pekon pada saat ini .

Ini karena ada saat selain harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, staf di pekon juga harus bisa membagi waktu untuk melakukan kepentingan pribadi salah satunya seperti mengurus lahan pertanian, karena mayoritas dari mata pencarian masyarakat di Pekon Sindang Pagar ini adalah dengan bertani. Kesulitan yang dihadapi masyarakat ketika berurusan saat musim besar dalam memanen kopi / padi, yaitu keadaan dimana staf di pekon sering tidak ada di tempat untuk memberikan pelayanan. disamping dalam memberikan pelayanan dengan waktu yang tidak maksimal juga dengan alasan tidak ada lagi masyarakat datang untuk berurusan sehingga harus pulang untuk mengurus urusan-urusan yang sifatnya pribadi, dan pada saat ada kegiatan di kecamatan maupun di kabupaten biasanya yang sifatnya melibatkan staf pekon kegiatan di kantor pekon diliburkan.

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku kepala pekon mampu memobilisasi masyarakat yang dipergunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Betapa bagusnya perumusan tujuan dan rencana dalam sebuah pekon, hanya akan sia-sia jika tidak

didukung dengan sumber daya manusia yang terampil. Suatu pekon didirikan pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, diantaranya adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, mempermudah masyarakat dalam pelayanan publik, dan untuk menjadikan pekon yang berpotensi dan bermutu, serta untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Oleh karena itu, diantara pemimpin dengan bawahan harus dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berbagai faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur salah satunya adalah gaya kepemimpinan yang digunakan. Adapun beberapa jenis gaya kepemimpinan dan tipe gaya kepemimpinan ini cukup ideal karena akan lebih mendekatkan seorang pemimpin dengan bawahannya sehingga apa yang menjadi keinginan dari pemimpin akan lebih mudah terpenuhi oleh bawahannya yaitu salah satunya adalah produktivitas dalam pembangunan infrastruktur yang meningkat.

Penelitian ini menyoroti gaya kepemimpinan kepala desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Pekon Sindang Pagar. Dengan melihat Produktivitas, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas Pemerintah Pekon. Perilaku kepemimpinan kepala pekon dalam pelaksanaan pembangunan merupakan analisis terhadap cara atau sikap kepala pekon secara langsung maupun tidak langsung dalam menetapkan, memimpin, dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keberhasilan atau kegagalan Peningkatan Pembangunan di pekon sangat

ditentukan oleh gaya kepemimpinan Kepala pekon, yang sejauh mana kepala pekon dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian, pelaksanaan, dalam kaitannya dalam manajemen berarti menjalankan kepemimpinan fungsi manajemen atau sebagai manajer dalam menjalankan fungsi manajemen.

Berkaitan dengan proses pembangunan infrastruktur pekon, kepala pekon berhasil memobilisasi potensi pekonnya dengan asumsi mempunyai anggaran kemudian income pekon di dalam prosesnya pembangunan infrastruktur terdiri dari dua unsur utama yaitu swadaya masyarakat dan pembinaan yaitu masyarakat dan pemerintah. Agar pembangunan bisa terlaksana tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinya. Kepala pekon dalam hal ini sangat berperan dalam pembangunan infrastruktur pekon di mana kepala pekon yang merupakan pemimpin formal di pekon serta memiliki tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan tugas urusan pembangunan PP No 72 Tahun 2005, khususnya di Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat di simpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“ Bagaimana Gaya Kepemimpinan Kepala Pekon Dalam Pembangunan infrastruktur di Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat ?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas dan menganalisis gaya kepemimpinan kepala pekon dalam pembangunan infrastruktur di Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

- a. Untuk menjelaskan teori ilmu-ilmu dalam bidang pemerintahan sosial dan politik, terutama teori-teori yang berkaitan dengan kepemimpinan.
- b. Untuk mendeskripsikan dan sebagai bahan rujukan dan peneliti-peneliti berikutnya.

#### 2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi perangkat-perangkat aparatur dan masyarakat Pekon Sindang Pagar dalam meningkatkan pembangunan pekon.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kualitas, terutama dalam membentuk sikap kehidupan pemerintahan dalam melaksanakan pemerintahan di tingkat pekon.